

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA MUNTAI
Jln. R.A. Kartini No. 1 RT.I Muara Muntai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2025

KEC MUARA MUNTAI

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra OPD Kec Muara Muntai tahun 2025 - 2029 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Kecamatan Muara Muntai Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Muntai Semoga LKjIP Kecamatan Muara Muntai ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Muara Muntai, Februari 2026


Camat Muara Muntai
MULYADI. SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP.19700205 200012 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Muntai berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025		PERSENTASE
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	100
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	68	100	100
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	90,11	102,05
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86,6	86,6
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100,00
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3,7	100
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	51,64	67,06
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110,02
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)	61,74	117,47
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	0,39	0,43
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	6
	E. Sumber Daya Aparatur	6
	F. Sumber Daya Keuangan	8
	G. Isu-Isu Strategis	8
	H. Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
	A. Perencanaan Kinerja	10
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	10
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	12
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
	B. Perjanjian Kinerja	16
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2023	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. Pengukuran Kinerja	22
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	26
	1 Analisis Kinerja Sasaran 1	26
	2 Analisis Kinerja Sasaran 2	28



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

	3	Analisis Kinerja Sasaran 3	29
	4	Analisis Kinerja Sasaran 4	30
	5	Analisis Kinerja Sasaran 5	31
	6	Analisis Kinerja Sasaran 6	32
	7	Analisis Kinerja Sasaran 7	33
	8	Analisis Kinerja Sasaran 8	34
	9	Analisis Kinerja Sasaran 9	35
	10	Analisis Kinerja Sasaran 10	36
	11	Analisis Kinerja Sasaran 11	37
	12	Analisis Kinerja Sasaran 12	38
	13	Analisis Kinerja Sasaran 13	39
	14	Analisis Kinerja Sasaran 14	40
	15	Analisis Kinerja Sasaran 15	41
	C.	Realisasi Anggaran	46
BAB IV		PENUTUP	49
LAMPIRAN			Xii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Muara Muntai dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 - 2029;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Muara Muntai Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan



menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Muntai
2. Mendorong Kecamatan Muara Muntai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Muntai untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Muara Muntai di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam)



kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kecamatan Muara Muntai masuk dalam zona Hulu yang terletak diantara $116^{\circ}31'$ Bujur Timur/Longitude East $116^{\circ}35'$ Bujur Timur/Longitude East $0^{\circ}18'$ Lintang Utara/Latitude North $0^{\circ}45'$ Lintang Selatan/Latitude South. Kecamatan Muara Muntai secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kabupaten Kutai Barat Sebelah Timur: Kecamatan Kota Bangun, Sebelah Selatan: Kecamatan Bongan Kutai Barat, Sebelah Barat: Kecamatan Muara Wis

Luas Kecamatan Muara Muntai $926,60 \text{ Km}^2$, dengan Luas Daratan $26.867,51 \text{ Km}^2$ dan Luas Lautan seluas $1.868,36 \text{ Km}^2$. Secara administratif Kecamatan Muara Muntai terdiri atas 13 desa.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Muntai



Dengan luas wilayah desa di Kecamatan Muara Muntai sebagai berikut:



Tabel 1.1. Luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Muntai

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa (Km ²)	Jumlah Dusun
1	Perian	732,00	0,00
2	Muara Leka	132,00	3,00
3	Muara Aloh	72,00	0,00
4	Jantur	10,78	1,00
5	Batuq	35,12	0,00
6	Rebaq Rinding	23,00	0,00
7	Muara Muntai Ulu	7,13	0,00
8	Muara Muntai Ilir	28,61	0,00
9	Kayu Batu	51,04	0,00
10	Jantur Selatan	51,12	0,00
11	Tanjung Batuq Harapan	36,00	0,00
12	Pulau Harapan	18,80	0,00
13	Jantur Baru	7,80	1,00
TOTAL		1.205,40	5,00

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Muntai

Jumlah penduduk mencapai 20.496 jiwa (Buku Kec Muara Muntai dalam Angka 2025), dan berdasarkan perekaman data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan semester II tahun 2025 sebanyak 22.404 jiwa. Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Muara Muntai:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Muntai Semester II Tahun 2025

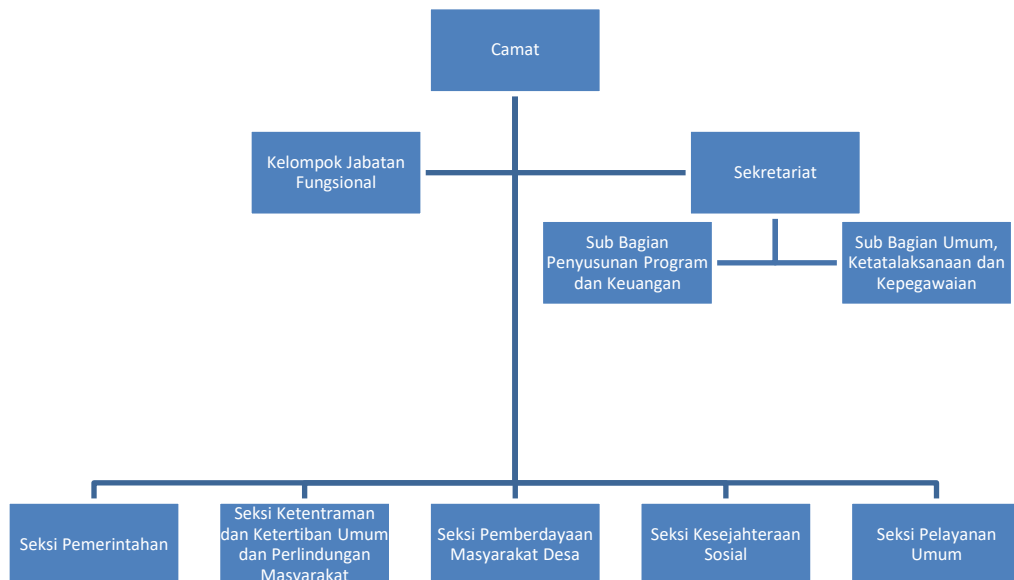
No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		L	P	L + P
1	Perian	2.395	1.981	4.376
2	Muara Leka	1.170	198	1.368
3	Muara Aloh	673	559	1.232
4	Jantur	1.063	989	2.052
5	Batuq	420	383	803
6	Rebaq Rinding	539	508	1.047
7	Muara Muntai Ulu	1.155	1.093	2.248
8	Muara Muntai Ilir	686	669	1.355
9	Kayu Batu	836	757	1.593
10	Jantur Selatan	1.251	1.995	3.246
11	Tj. Batuq Harapan	226	198	424
12	Pulau Harapan	626	631	1.257
13	Jantur Baru	641	601	1.242
Jumlah		11.681	10.562	22.243

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kec Muara Muntai Semester II Tahun 2025



C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Kecamatan Muara Muntai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Muara Muntai per 31 Desember 2025 sebanyak **41,00** orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:



a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	1,00	0,00	1,00	2,44%
2	SLTP	1,00	0,00	1,00	2,44%
3	SLTA	17,00	10,00	27,00	65,85%
5	D-I	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	D-II	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	D-III	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	D-IV	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	S1	8,00	4,00	12,00	29,27%
10	S2	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	S3	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		27,00	14,00	41,00	100,00%

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	1	0	1	2,44%
2	II	16	7	23	56,10%
3	III	9	7	16	39,02%
4	IV	1	0	1	2,44%
Jumlah		27	14	41	100%

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.7. PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	11,11%
4	III.b	1	0	1	11,11%
5	IV.a	4	1	5	55,56%
6	IV.b	1	1	2	22,22%
Jumlah		7	2	9	100%



d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.8. PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	7	2	9	21,95%
2	Fungsional (Pelaksana)	20	12	32	78,05%
Jumlah		27	14	41	100%

F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Muntai pada Tahun 2025 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Muara Muntai di awal anggaran (APBD Murni) mendapatkan alokasi sebesar Rp.8.056.795.115,00 dan pada Anggaran Perubahan sebesar Rp.12.291.067.594,00 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

1. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
2. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Meningkatkan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Meningkatnya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan



H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Muntai merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Muara Muntai yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 didasarkan pada hasil proses perumusan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Terbaik Dalam Mewujudkan Pemenuhan Dan Pemerataan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial;
2. Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Fondasi Ekonomi Baru Non Ekstraktif;
3. Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;



4. Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal;
5. Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Dasar Pembangunan Kewilayahan Yang Berkeadilan.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029. Dalam hal ini Kecamatan Muara Muntai mengampu **Misi tiga** yang terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Sasaran
1.	Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan demokrasi substansial dan stabilitas kondusivitas wilayah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Muara Muntai berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT;

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Muntai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan



tugas dan fungsi Kecamatan Muara Muntai adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan demokrasi substansial dan stabilitas kondusivitas wilayah.

b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Muntai, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	Persen	93,4	95	96	98	100	100

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Tabel 2. 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Muntai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; 6. Meningkatkan kinerja dan tata kelola kecamatan.	1. Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan; 2. Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; 3. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan; 4. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat; 5. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; 6. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; 7. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 8. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; 9. Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2. 4. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



			Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	90
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	68
3	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

4	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	5	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	7	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	8	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	9	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	11	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	12	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	14	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	15	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	16	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)



17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	18	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau

C. Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2025, Kecamatan Muara Muntai melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.18.334.336.277,00 Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Perubahan Menurun sebesar Rp. 16.831.569.832,00 penurunan belanjanya sebesar Rp.1.502.796.445,00

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp18.334.366.277,00	Rp16.831.569.832,00	(Rp1.502.796.445,00)

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp17.163.268.277,00	Rp15.833.347.832,00	(Rp1.329.920.445,00)
Belanja Modal	Rp1.171.098.000,00	Rp998.222.000,00	(Rp172.876.000,00)
Total	Rp18.334.366.277,00	Rp16.831.569.832,00	(Rp1.502.796.445,00)

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Kecamatan Muara Muntai mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.8 berikut ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Tabel 2. 8. Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan	Rp.18.334.336.277,00	Rp.16.831.569.832,00	(Rp.1.502.796.445,00)
Total	Rp.18.334.336.377,00	Rp.16.831.569.832,00	(Rp.1.502.796.445,00)

3. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 merencanakan 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2. 9. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
						(Sebelum)	(Sesudah)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp9.545.752.977,00	Rp8.718.961.632,00	(Rp826.791.345,00)
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp605.000.000,00	Rp290.184.865,00	(Rp314.815.135,00)
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp140.000.000,00	Rp63.713.000,00	(Rp76.287.000,00)
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp5.000.000,00	Rp12.598.000,00	Rp7.598.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp70.000.000,00	Rp33.189.565,00	(Rp36.810.435,00)
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp60.000.000,00	Rp17.664.000,00	(Rp42.336.000,00)
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp300.000.000,00	Rp148.020.300,00	(Rp151.979.700,00)
7	1	1	2,01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp25.000.000,00	Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.429.978.533,00	Rp6.464.812.432,00	Rp34.833.899,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.306.802.591,00	Rp6.353.206.890,00	Rp46.404.299,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp25.000.000,00	Rp10.904.600,00	(Rp14.095.400,00)
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp73.175.942,00	Rp87.695.942,00	Rp14.520.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp25.000.000,00	Rp13.005.000,00	(Rp11.995.000,00)
7	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp255.000.000,00	Rp199.195.000,00	(Rp55.805.000,00)
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp25.000.000,00	Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp150.000.000,00	Rp146.215.000,00	(Rp3.785.000,00)
7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp50.000.000,00	Rp25.000.000,00	(Rp25.000.000,00)
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp30.000.000,00	Rp15.480.000,00	(Rp14.520.000,00)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp403.309.974,00	Rp352.929.037,00	(Rp50.380.937,00)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp45.000.000,00	Rp40.927.500,00	(Rp4.072.500,00)
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp20.000.000,00	Rp2.380.550,00	(Rp17.619.450,00)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp40.809.974,00	Rp24.004.987,00	(Rp16.804.987,00)
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp10.000.000,00	Rp4.469.200,00	(Rp5.530.800,00)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp220.000.000,00	Rp213.646.800,00	(Rp6.353.200,00)
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.068.000.000,00	Rp754.402.000,00	(Rp313.598.000,00)
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp180.000.000,00	Rp0,00	(Rp180.000.000,00)
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp200.000.000,00	Rp66.402.000,00	(Rp133.598.000,00)
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp488.000.000,00	Rp488.000.000,00	Rp0,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp694.464.470,00	Rp567.438.298,00	(Rp127.026.172,00)
7	1	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp356.612.278,00	Rp356.612.278,00	Rp0,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp334.852.192,00	Rp207.826.020,00	(Rp127.026.172,00)
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp40.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp20.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp50.000.000,00	Rp30.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp6.891.613.300,00	Rp6.742.058.050,00	(Rp149.555.250,00)
7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp500.000.000,00	Rp457.905.750,00	(Rp42.094.250,00)
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp150.000.000,00	Rp109.345.750,00	(Rp40.654.250,00)
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp350.000.000,00	Rp348.560.000,00	(Rp1.440.000,00)
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp150.000.000,00	Rp93.227.000,00	(Rp56.773.000,00)
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp150.000.000,00	Rp93.227.000,00	(Rp56.773.000,00)
7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp6.241.613.300,00	Rp6.190.925.300,00	(Rp50.688.000,00)
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp891.613.300,00	Rp852.335.300,00	(Rp39.278.000,00)
7	1	2	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp5.350.000.000,00	Rp5.338.590.000,00	(Rp11.410.000,00)
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp686.000.000,00	Rp525.093.150,00	(Rp160.906.850,00)
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp200.000.000,00	Rp154.276.650,00	(Rp45.723.350,00)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp150.000.000,00	Rp121.784.150,00	(Rp28.215.850,00)
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp50.000.000,00	Rp32.492.500,00	(Rp17.507.500,00)
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp486.000.000,00	Rp370.816.500,00	(Rp115.183.500,00)
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp486.000.000,00	Rp370.816.500,00	(Rp115.183.500,00)
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp175.000.000,00	Rp104.509.000,00	(Rp70.491.000,00)
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp175.000.000,00	Rp104.509.000,00	(Rp70.491.000,00)
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp175.000.000,00	Rp104.509.000,00	(Rp70.491.000,00)
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp730.000.000,00	Rp611.558.000,00	(Rp118.442.000,00)
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp730.000.000,00	Rp611.558.000,00	(Rp118.442.000,00)
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp680.000.000,00	Rp586.558.000,00	(Rp93.442.000,00)
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp50.000.000,00	Rp25.000.000,00	(Rp25.000.000,00)
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp306.000.000,00	Rp129.390.000,00	(Rp176.610.000,00)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp306.000.000,00	Rp129.390.000,00	(Rp176.610.000,00)
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp306.000.000,00	Rp129.390.000,00	(Rp176.610.000,00)
Jumlah						Rp18.334.366.277,00	Rp16.831.569.832,00	(Rp1.502.796.445,00)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai



berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Muara Muntai atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2025 yang terdiri dari 15 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Muntai. Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	100	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	2 Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	68	100	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	5 Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0	Kurang Berhasil
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	90,11	102,05	Sangat Berhasil
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	7 Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	8 Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	9 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0	Kurang Berhasil
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	10 Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86,6	86,6	Berhasil
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	11 Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	12 Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100,00	Sangat Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3,7	100	Sangat Berhasil
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	14	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	51,64	67,06	Cukup Berhasil
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	15	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110,02	Sangat Berhasil
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	16	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)	61,74	117,47	Sangat Berhasil
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	0,39	0,43	Kurang Berhasil
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	18	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Sangat Berhasil
Rata - Rata								Berhasil

Berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 - 2029, pada tahun 2024 Kecamatan Muara Muntai memiliki 39 (tiga puluh sembilan) sasaran dan 41 (empat puluh satu) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2025 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2025, Kecamatan Muara Muntai memiliki 15 (lima belas) sasaran dan 18 (delapan belas) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 53,33%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 10 Indikator, atau 20%;
- Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 13,33%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 13,33%.



B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan ”

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan serta jangkauan pelayanan publik kecamatan dapat dirasakan oleh segenap penerima layanan dengan secara mudah dapat merasakannya. Untuk mengukur kinerja sasaran pertama di ditetapkanlah dengan 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

1.1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

Rumusan dari indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan Masyarakat yang masuk di kali seratus di bagi dengan jumlah target indikator sasaran

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	100



Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan” pada indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti yang realisasi target capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 90 persen dari rencana target 90 persen atau target kinerja tercapai.

1.2. Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum

Rumusan dari indikator Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kasus yang ditangani dibagi Total Kasus Trantibum di Kecamatan

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Sasaran Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Persen	68	68	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan” pada indikator Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum yang realisasi target capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 68 persen dari rencana target 68 persen atau target kinerja tercapai. Adapun kasus yang di tangani selama tahun 2025 adalah



pengamanan hari – hari besar dan Keagamaan dimana yang kesemuanya dapat diselesaikan dan dilakukan pengamanannya dengan baik. Langkah – langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penanganan kasus ketentraman dan ketertiban umum adalah :

- Optimalisasi anggota Limnas Kecamatan untuk memantau setiap kegiatan – kegiatan pada hari – hari besar dan keagamaan;
- Bekerjasama dengan Anggota Kepolisian Kecamatan dalam rangka pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultansi Publik”

Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan ketepatan waktu Penyampaian atas Laporan SKM dan Laporan RTL. Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

2.1. Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultansi Publik (FKP).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)” mencapai **0%** dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23. Pengukuran Presentasi Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultansi Publik (FKP).

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultansi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Dokumen Laporan dan Dokumentasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Tabel 2.24. Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP).	Persen	100	0	0

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasarannya sebesar 0% atau termasuk predikat “Kurang Berhasil”

3. Analisis Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sasaran ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pada OPD Kecamatan Muara Muntai. Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat” mencapai **100%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Pengukuran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kepuasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Hasil survei yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan umum



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Masyarakat		
------------	--	--

Tabel 3.13. Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Persen	88,30	90,11	100

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasarannya sebesar 100% atau termasuk predikat “Berhasil”

4. Analisis Kinerja Sasaran 4: “Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapoaran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”

Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan ketepatan waktu Penyampaian Tindak Lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI. Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

4.1. Tidak Lanjut hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapoaran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” mencapai **0%** dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapoaran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25. Pengukuran Tidak Lanjut hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD tahun terakhir sebelumnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapoaran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tidak Lanjut hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya.	Jumlah Temuan Administrasi BPK yang telah ditindak lanjuti perangkat daerah.

Tabel 3.26. Realisasi Indikator Sasaran Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapoaran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapoaran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tidak Lanjut hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya.	Persen	100	0	0

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasarannya sebesar 0% atau termasuk predikat “Kurang Berhasil” karena selama tahun 2025 tidak ada temuan pemeriksaan BPK RI sehingga tidak ada yang di tindaklanjuti.

5. **Analisis Kinerja Sasaran 5:** “Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”. Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

5.1. Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)” mencapai **100%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.37. Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen

Tabel 3.38. Realisasi Indikator Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.	Level	3	3	100

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasaranannya sebesar 100% atau termasuk predikat “Berhasil”.

6. Analisis Kinerja Sasaran 6 : “Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam pekan Inovasi Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah” dengan indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah mencapai **0,00%** dan termasuk predikat **“Kurang Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.43. Pengukuran Kinerja dengan Jumlah Inovasi

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Penghargaan atas prestasi inovasi yang dibuat

Tabel 3.44. Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasarnya sebesar 0% atau termasuk predikat “Kurang Berhasil”

7. Analisis Kinerja Sasaran 7: “Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor”

Hal ini bertujuan untuk mendorong SKPD dalam melakukan proses tindak lanjut atas aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N. Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

7.1. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tindak Lanjut Pengaduan



SP4N Lapor mencapai **100%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14. Pengukuran Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor.	Jumlah Laporan/aduan Masyarakat melalui SP4N dikali seratus dibagi dengan jumlah laporan yang selesai ditindaklanjuti.

Tabel 3.15. Realisasi Indikator Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor..	Persen	100	86,6	100

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasaranannya sebesar 100% atau termasuk predikat “Berhasil”

8. Analisis Kinerja Sasaran 8: “Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia”

Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan SKPD dalam menyelesaikan dan melaporkan Laporan data – data dan menginput kedalam aplikasi Satu Data Indonesia. Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

8.1. Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia” mencapai **100%** dan termasuk



predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18. Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia.	Jumlah data yang sudah diinput kedalam aplikasi dikali seratus dibagi rencana target

Tabel 3.19. Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100	100	100

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasarnya sebesar 100% atau termasuk predikat “Berhasil”

9. **Analisis Kinerja Sasaran 9:** “Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di perangkat daerah”. Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

- 9.1. Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di perangkat daerah. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”” mencapai **100%** dan termasuk



predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.35. Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)".

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan

Tabel 3.36. Realisasi Indikator Sasaran Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasaranannya sebesar 100% atau termasuk predikat **“Berhasil”**.

10. Analisis Kinerja Sasaran 10: “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Untuk mengukur kinerja sasaran ini ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator yaitu sebagai berikut:

10.1. Nilai LPPD

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Nilai LPPD” dengan Predikat mencapai **100%** dan termasuk predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Nilai LPPD terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.39. Pengukuran Kinerja dengan indikator Nilai LPPD

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai

Tabel 3.40. Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7	3.7	100

Realisasi dari Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai LPPD diperoleh dari laporan hasil penilaian sebagaimana terlampir.

11. Analisis Kinerja Sasaran 11: “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai **67,06%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.41. Pengukuran Kinerja dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara



Tabel 3.42. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	51,64	67,06

Dari tabel realisasi di atas atas Pengukuran Target kinerja dan Indikator target kinerja ini dapat dikatakan bahwa realisasi dari capaian target indikator sasarannya sebesar 67,06% atau termasuk predikat “Berhasil”.

12. Analisis Kinerja Sasaran 12: “Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani”

Untuk mengukur kinerja sasaran ini ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

12.1. Indikator Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani ” dengan indikator sasaran Indeks RB Kabupaten mencapai 100% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Indeks RB Kabupaten. terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.45. Pengukuran Kinerja dengan indikator Indeks RB Kabupaten.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Hasil Penilaian instansi penilai.

Tabel 3.46. Realisasi Indikator Indeks RB Kabupaten

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Pada sasaran ini dimana output kegiatan terealisasi sebesar 100% hal ini bisa dilihat pada Dokumen Laporan yang disajikan oleh sub bagian umum tatalaksana dan kepegawaian kec Muara Muntai tahun 2025.

13. Analisis Kinerja Sasaran 13: Meningkatnya Inovasi Daerah

Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

13.1. Indikator Meningkatnya Inovasi Daerah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Indeks Inovasi Daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

mencapai 100% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Indeks Inovasi Daerah. terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.47. Pengukuran Kinerja dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Pemenuhan kewajiban dalam menyediakan informasi terkait data dan informasi yang dikeluarkan perangkat daerah.

Tabel 3.48. Realisasi Indikator Sasaran Indeks Inovasi Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	52,56	61,74	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Pada sasaran ini dimana output kegiatan terealisasi sebesar 100% hal ini bisa dilihat pada Dokumen Laporan yang disajikan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial kec Muara Muntai tahun 2024

14. Analisis Kinerja Sasaran 14: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator



sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

14.1. Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai 0,43% dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.49. Pengukuran Kinerja dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Laporan Penilaian Ortal.

Tabel 3.50. Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	0,39	0,43

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Pada sasaran ini dimana output kegiatan terealisasi sebesar 0,43% hal ini bisa dilihat pada Dokumen Laporan yang disajikan oleh Seksi Pelayanan Umum kec Muara Muntai tahun 2025

15. Analisis Kinerja Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Untuk mengukur kinerja sasaran ini di ditetapkanlah dengan 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

15.1. Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai 100% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.49. Pengukuran Kinerja dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Hasil Laporan

Tabel 3.50. Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	0,43

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Pada sasaran ini dimana output kegiatan terealisasi sebesar 100% hal ini bisa dilihat pada Dokumen Laporan yang disajikan oleh Seksi Pelayanan Umum kec Muara Muntai tahun 2025

Sasaran 1 sampai dengan 15 sebagaimana diatas dicapai melalui Program – Program sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Tabel 3.50. Program dan Anggaran Sasaran 1 s/d 16 Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.961.632,00	7.463.407.998,00	85,60
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.742.058.050,00	5.070.529.766,00	75,21
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	525.093.150,00	348.652.000,00	66,40
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.509.000,00	-	0,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	611.558.000,00	450.543.607,00	73,67
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	129.390.000,00	-	0,00
TOTAL		16.831.569.832,00	13.333.133.371,00	79,22

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.**13.333.133.371,00** atau 79,22% dari anggaran sebesar Rp.**16.831.569.832,00** maka target sasaran dapat dikatakan tercapai, walaupun masih terdapat kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berbeda dengan perjanjian kinerja tahun - tahun sebelumnya, karena selain sasaran dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam renstra perangkat daerah, juga memuat indikator tambahan. Indikator tambahan dituangkan dalam perjanjian kinerja atas permasalahan yang masih ada dan belum mendapat perhatian, sehingga dengan dimuat dalam perjanjian kinerja, diharapkan permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk diselesaikan.

Karena indikator ada yang bertambah dan ada yang di kurangi pada Tahun 2025, sehingga tidak semua capaian kinerja tahun 2025 bisa dibandingkan dengan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

capaian kinerja tahun 2024. Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51. Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Kategori Kinerja
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	85	100	100	90	0	100	Kurang Berhasil
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	Persen	67	100	100	68	100	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen				100	100	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forim Konsultansi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultansi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	100	0	0,00	Kurang Berhasil
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapoaran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	TTindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	0	0	100	100	100,00	Sangat Berhasil
5	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	3	3	100,00	Sangat Berhasil
6	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	77	51,64	67,06	Cukup Berhasil
7	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	1	0	0,00	Kurang Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	100	86,6	86,60	Berhasil
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,6	3,6	3,7 (Tinggi)	3,7	100,00	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	63	86,3	77	51,64	67,06	Cukup Berhasil
11	Meningkatnya Manajemen birokrasi yang efektif, evesien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	64	64	65	71,51	110,02	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	49,57	49,57	52,56 (Inovatif)	61,74	117,47	Sangat Berhasil
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	8,95	8,95	90	0,39	0,43	Kurang Berhasil
14	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat				Zona Hijau	Zona Hijau	100	Sangat Berhasil
15	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan				48	48	100,00	Sangat Berhasil
16	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	100	100	100	88,30 (Baik)	90,11	102,05	Sangat Berhasil
	RATA - RATA									Sangat Berhasil

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2025 dapat dijelaskan bawa terdapat 3 indikator yang menunjukkan angka capaian kinerja kurang berhasil jika dibandingkan dengan tahun 2024, ada 3 indikator sasaran pada tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran, dan baru di tahun 2025 baru di muat indikator sasarannya. Kemudian 9 indikator sasaran lainnya masih menjadi indikator yang dilakukan pengukurannya di tahun 2025



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ada pada Kecamatan Muara Muntai dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 79,22%, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.70. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.718.961.632,00	7.463.407.998,00	85,60	1.255.553.634,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.184.865,00	74.055.000,00	25,52	216.129.865,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.713.000,00	35.465.000,00	55,66	28.248.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	1.170.000,00	46,80	1.330.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.598.000,00	7.020.000,00	55,72	5.578.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.189.565,00	12.340.000,00	37,18	20.849.565,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.664.000,00	-	0,00	17.664.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	148.020.300,00	18.060.000,00	12,20	129.960.300,00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000,00	-	0,00	12.500.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.464.812.432,00	5.883.563.171,00	91,01	581.249.261,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.353.206.890,00	5.796.223.171,00	91,23	556.983.719,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.904.600,00	3.880.000,00	35,58	7.024.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	87.695.942,00	81.120.000,00	92,50	6.575.942,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.005.000,00	2.340.000,00	17,99	10.665.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	199.195.000,00	128.738.120,00	64,63	70.456.880,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.500.000,00	2.930.000,00	23,44	9.570.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	146.215.000,00	116.208.120,00	79,48	30.006.880,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	-	0,00	25.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.480.000,00	9.600.000,00	62,02	5.880.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.929.037,00	248.756.757,00	70,48	104.172.280,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	-	0,00	7.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.927.500,00	36.855.000,00	90,05	4.072.500,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.380.550,00	-	0,00	2.380.550,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.004.987,00	600.000,00	2,50	23.404.987,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.469.200,00	-	0,00	4.469.200,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	14.844.000,00	74,22	5.156.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.646.800,00	196.457.757,00	91,95	17.189.043,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000,00	-	0,00	40.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	754.402.000,00	687.768.788,00	91,17	66.633.212,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.402.000,00	31.458.510,00	47,38	34.943.490,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	488.000.000,00	457.332.826,00	93,72	30.667.174,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.977.452,00	99,49	1.022.548,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.438.298,00	398.554.562,00	70,24	168.883.736,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.612.278,00	237.577.610,00	66,62	119.034.668,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.826.020,00	160.976.952,00	77,46	46.849.068,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	41.971.600,00	46,64	48.028.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	41.486.600,00	69,14	18.513.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	485.000,00	1,62	29.515.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.742.058.050,00	5.070.529.766,00	75,21	1.671.528.284,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	457.905.750,00	300.679.856,00	65,66	157.225.894,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	109.345.750,00	56.298.806,00	51,49	53.046.944,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	348.560.000,00	244.381.050,00	70,11	104.178.950,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	93.227.000,00	3.360.000,00	3,60	89.867.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.227.000,00	3.360.000,00	3,60	89.867.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.190.925.300,00	4.766.489.910,00	76,99	1.424.435.390,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	852.335.300,00	75.455.480,00	8,85	776.879.820,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.338.590.000,00	4.691.034.430,00	87,87	647.555.570,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	525.093.150,00	348.652.000,00	66,40	176.441.150,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	154.276.650,00	105.095.000,00	68,12	49.181.650,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	121.784.150,00	105.095.000,00	86,30	16.689.150,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.492.500,00	-	0,00	32.492.500,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	370.816.500,00	243.557.000,00	65,68	127.259.500,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	370.816.500,00	243.557.000,00	65,68	127.259.500,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.509.000,00	-	0,00	104.509.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	104.509.000,00	-	0,00	104.509.000,00
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	104.509.000,00	-	0,00	104.509.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	611.558.000,00	450.543.607,00	73,67	161.014.393,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	611.558.000,00	450.543.607,00	73,67	161.014.393,00
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	586.558.000,00	450.543.607,00	76,81	136.014.393,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000,00	-	0,00	25.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	129.390.000,00	-	0,00	129.390.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	129.390.000,00	-	0,00	129.390.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	129.390.000,00	-	0,00	129.390.000,00
Jumlah	16.831.569.832,00	13.333.133.371,00	79,22	3.498.436.461,00



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Muntai tahun 2025 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Muara Muntai pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Renstra Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 - 2029. Kecamatan Muara Muntai telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025.

Tabel 4. 1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	100	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	68	100	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	5	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0	Kurang Berhasil
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	90,11	102,05	Sangat Berhasil
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	7	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	8	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	9	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0	Kurang Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025

7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86,6	86,6	Berhasil
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	11	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	12	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100,00	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3,7	100	Sangat Berhasil
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	14	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	51,64	67,06	Cukup Berhasil
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	15	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110,02	Sangat Berhasil
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	16	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)	61,74	117,47	Sangat Berhasil
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	0,39	0,43	Kurang Berhasil
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	18	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 - 2029, pada tahun 2025 Kecamatan Muara Muntai memiliki 15 (lima belas) sasaran dan 16 (enam belas) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2025 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2025, Kecamatan Muara Muntai memiliki 15 (lima belas) sasaran dan 16 (enam belas) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:



- a) Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori "sangat berhasil" sebanyak 0 Indikator, atau 53,33%;
- b) Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori "berhasil" sebanyak 10 Indikator, atau 20%;
- c) Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori "cukup berhasil" sebanyak 1 Indikator, atau 13,33%; dan
- d) Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori "kurang berhasil" sebanyak 2 Indikator, atau 13,33%.

Tabel 4. 2: Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp	17.163.268.277,00	Rp	15.833.347.832,00	-Rp 1.329.920.445,00
Belanja Modal	Rp	1.171.098.000,00	Rp	998.222.000,00	-Rp 172.876.000,00
Total	Rp	18.334.366.277,00	Rp	16.831.569.832,00	-Rp 1.502.796.445,00

Semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat memenuhi pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Jika terdapat indikator tujuan dan indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan hal tersebut sangat disadari bahwa LKjIP Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP sangat diharapkan sehingga untuk tahun - tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.


Kecamatan Muara Muntai
MULYADI, SE., M.Si
Pembina Tk II/ IV b
NIP.19700205 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MUARA MUNTAI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYADI, S.E.,M.Si.

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

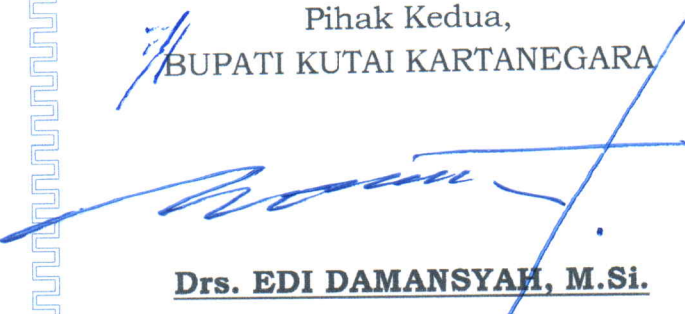
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

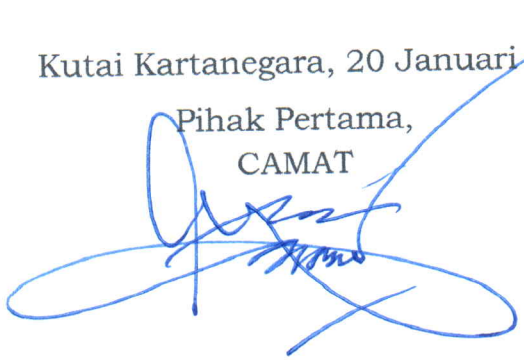
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
CAMAT


MULYADI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197002052000121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MUARA MUNTAI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	90
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	68
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
KECAMATAN MUARA MUNTAI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.9.545.752.977	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.6.891.613.300	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.686.000.000	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.175.000.000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.730.000.000	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.306.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.18.334.366.277	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
CAMAT

MULYADI, S.E.,M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197002052000121003